



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KP-DJPL 612 Tahun 2025

TENTANG
JARINGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR (*LINER*) PENYELENGGARAAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK/*PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)*
BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut berhak menetapkan jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pembahasan pada Pra Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026 serta hasil Rapat Sinkronisasi Rencana Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

/Tahun...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
 5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1419);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1231);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 223);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JARINGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR (*LINER*) PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK/*PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)* BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Jaringan Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi, diatur sebagai berikut:
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan pangkal untuk kelancaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi;
 - c. Secara fungsional Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - 1) Di pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi setiap *voyage* dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - 2) Di pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan /operasional...

operasional penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi.

d. Pemerintah Daerah Pelabuhan Pangkal dan Pelabuhan Singgah:

- 1) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan pengelola kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi;
- 2) Terhadap pelabuhan singgah yang belum dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan tetapi masyarakat membutuhkan layanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan kapal pengumpan serta menyediakan personal *safety equipment (life vest, life buoy, dan safety nett)* di pelabuhan singgah yang tidak dapat disandari.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

04 DEC 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,



MUHAMMAD MASYHUD

NIP. 19700622 199803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
9. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Gubernur Provinsi di Pelabuhan Pangkal dan Pelabuhan Singgah;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Pelabuhan Pangkal dan Pelabuhan Singgah;
14. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan pangkal;
15. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan singgah;
16. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
17. Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
18. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 612 Tahun 2025
TENTANG JARINGAN TRAYEK TETAP DAN
TERATUR (LINER) PENYELENGGARAAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK/PUBLIC
SERVICE OBLIGATION (PSO) BIDANG
ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS
EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA KAPAL	PANGKALAN	TRAYEK	1 ROUND VOYAGE	JARAK
1	KM. KELIMUTU	Tg. Priok	Trayek A : Tg.Priok – 197- Tg. Pandan– 230 - Pontianak – 467- Semarang – 265- Kumai -265 - Semarang – 467 - Pontianak – 230- Tg.Pandan – 197 - Tg.Priok	12 Hari	2.318 Mil Laut
			Trayek B : Tg.Priok – 197- Tg. Pandan– 230 - Pontianak – 467- Semarang – 265- Kumai – 289 – Surabaya - 333 – Batulicin – 333 – Surabaya – 289 – Kumai – 265 - Semarang – 467 - Pontianak – 230- Tg.Pandan – 197 - Tg.Priok	16 Hari	3.562 Mil Laut
2	KM. LAWIT	Surabaya	Trayek A: Kumai -289- Surabaya -293- Sampit -326- Semarang -265- Kumai - 265- Semarang - 72- Karimun Jawa -72- Semarang -326- Sampit - 293- Surabaya -289- Kumai	14 Hari	2.490 Mil Laut
			Trayek B : Kumai -289- Surabaya -295- Benoa -250- Bima -150- Waingapu - 98- Ende -123- Lewoleba -120- Kupang -52- Rote -52- Kupang -120- Lewoleba -123- Ende -98- Waingapu -150- Bima -250- Benoa -295- Surabaya -289- Kumai	14 Hari	2.754 Mil Laut

NO	NAMA KAPAL	PANGKALAN	TRAYEK	1 ROUND VOYAGE	JARAK
3	KM. TIDAR	Tg. Priok	Kijang -498- Tg. Priok - 396-Surabaya -458- Makassar – 243- Bau Bau – 200 -Maumere -81- Larantuka -32-Lewoleba -120- Kupang - 120 -Lewoleba -32- Larantuka -81-Maumere -200- Bau Bau- 243- Makassar -458- Surabaya -396- Tg. Priok - 498- Kijang	14 Hari	4.056 Mil Laut
4	KM. TATAMAILAU	Bitung	Trayek A : Bitung -150- Tidore (Soasio) -155- Tobelo - 302- Sorong -224- Fak-Fak -182- Kaimana -138- Tual -109- Dobo -182- Timika -182- Dobo 109- Tual -138- Kaimana -182- Fak-Fak -224- Sorong - (302)- Tobelo -155- Tidore (Soasio) -150- Bitung	12 Hari	2.884 Mil Laut
			Trayek B : Bitung – 146 - Ternate – 323 - Ambon – 330 - Tual – 109- Dobo – 182 - Timika – 110 - Agats – 380 - Merauke – 380 - Agats – 110 - Timika – 182 - Dobo – 109 - Tual – 330 - Ambon – 323 - Ternate – 146 - Bitung	16 Hari	3.160 Mil Laut
5	KM. SIRIMAU	Kupang	Sorong -345- Ambon -283- Wanci -86- Bau- Bau -200- Maumere - 97- Lewoleba -120- Kupang -137- Kalabahi -450- Saumlaki -207- Tual -109- Dobo -182- Timika -110- Agats -380- Merauke -380-Agats -110- Timika -182- Dobo - 109 - Tual -207- Saumlaki -450-Kalabahi -137- Kupang -120-Lewoleba -97- Maumere -200-Bau-Bau -86- Wanci -283-Ambon -345- Sorong	28 Hari	5.412 Mil Laut
6	KM. AWU	Surabaya	Kumai -289- Surabaya -295- Benoa -250- Bima -150- Waingapu - 98- Ende -146- Kupang -137- Kalabahi 137- Kupang -146- Ende - 98- Waingapu -150- Bima -250- Benoa -295- Surabaya -289- Kumai	14 Hari	2.730 Mil Laut
7	KM. CIREMAI	Tg. Priok	Tg.Priok -396- Surabaya -458- Makassar -243- Bau-Bau -407- Ambon -345- Sorong -360- Serui -310- Jayapura -310- Serui -360- Sorong -345- Ambon -407- Bau-Bau -243- Makassar -458- Surabaya -396- Tg.Priok	14 Hari	5.038 Mil Laut

NO	NAMA KAPAL	PANGKALAN	TRAYEK	1 ROUND VOYAGE	JARAK
8	KM. DOBONSOLO	Tg. Priok	Trayek A : Tg.Priok -396- Surabaya -458- Makassar -243- Bau-Bau -634- Sorong -220- Manokwari -140- Biak -310- Jayapura -310- Biak -140- Manokwari -220- Sorong -634- Bau-Bau -243- Makassar -458- Surabaya -396- Tg.Priok	16 Hari	4.802 Mil Laut
			Trayek B : Tg.Priok -396- Surabaya -458- Makassar -243- Bau-Bau -634- Sorong -220- Manokwari -220- Sorong -634- Bau-Bau -243- Makassar -458- Surabaya -396- Tg.Priok	12 Hari	3.902 Mil Laut
9	KM. LEUSER	Surabaya	Surabaya -295- Benoa -250 - Bima -83- Labuanbajo -210 - Makassar -243 - Bau-Bau -86 - Wanci -217- Namrole -105 - Ambon -384 - Saumlaki -207 - Tual -109 - Dobo -182- Timika -110 - Agats -380- Merauke -380 - Agats -110 - Timika -182 - Dobo -109 - Tual -207- Saumlaki -384- Ambon -105- Namrole -217- Wanci -86- Bau- Bau -243-Makassar -210- Labuanbajo -83- Bima -250 - Benoa -295-Surabaya	28 Hari	5.722 Mil Laut
10	KM. BINAIYA	Benoa	Trayek A : Benoa -250- Bima -83- Labuan Bajo -210- Makassar -128- Awerange -300- Bontang -300 - Pare Pare -300- Bontang -300- Awerange -128- Makassar -210 Labuan Bajo -83- Bima -250 Benoa -298- Labuan Bajo -298- Benoa	14 Hari	3.138 Mil Laut
			Trayek B : Benoa -250- Bima -83- Labuan Bajo -210- Makassar -128- Pare Pare -300- Bontang -300 - Pare Pare -128- Makassar -210 Labuan Bajo -83- Bima -250 Benoa -250- Bima -150- Waingapu -352- Benoa -352- Waingapu -150- Bima -250 - Benoa	14 Hari	3.446 Mil Laut

NO	NAMA KAPAL	PANGKALAN	TRAYEK	1 ROUND VOYAGE	JARAK
11	KM. BUKIT RAYA	Tg. Priok	Tg.Priok -325- Blinyu -170- Kijang -160- Letung - 50 - Tarempa - 130 - Natuna - 47 - Midai - 95 - Serasan - 181 - Pontianak - 547 - Surabaya - 547- Pontianak - 181 - Serasan- 95 - Midai - 47 - Natuna - 130 - Tarempa - 50 - Letung - 160 - Kijang - 170 - Blinyu - 325 - Tg.Priok	14 Hari	3.410 Mil Laut
12	KM. TILONGKABILA	Benoa	Benoa -54- Lembar (Gilimas) -202- Bima -83-Labuanbajo -210- Makassar -243- Bau-Bau -41- Raha -72-Kendari -212- Luwuk -142- Gorontalo -172- Bitung -172- Gorontalo -142- Luwuk -212- Kendari -72- Raha -41- Bau-Bau -243- Makassar -210- Labuanbajo -83- Bima -202- Lembar (Gilimas) -54- Benoa	14 Hari	2.862 Mil Laut
13	KM. BUKIT SIGUNTANG	Makassar	Makassar - 128 - Pare-Pare - 250 - Balikpapan -388 - Tarakan - 91 - Nunukan - 432 - Balikpapan - 250 - Pare-Pare - 128 - Makassar - 296 - Maumere - 97 - Lewoleba - 120 Kupang - 120 - Lewoleba - 97 - Maumere - 296 - Makassar - 128 - Pare-Pare - 250 - Balikpapan - 388- Tarakan - 91- Nunukan - 432 - Balikpapan - 250- Pare-Pare - 128- Makassar	14 Hari	4.360 Mil Laut
14	KM. LAMBELU	Makassar	Makassar - 128 - Pare-Pare - 250 - Balikpapan - 388 - Tarakan - 91 - Nunukan - 323 - Donggala - 188 - Balikpapan - 250 - Pare-Pare - 128- Makassar -243- Bau-Bau - 200 - Maumere -81-Larantuka - 180- Bau-Bau- 243- Makassar - 128 - Pare-Pare - 250 - Balikpapan -188- Donggala - 292- Tarakan -91-Nunukan - 432- Balikpapan - 250-Pare-Pare -128- Makassar	14 Hari	4.452 Mil Laut
15	KM. SINABUNG	Surabaya	Surabaya -458- Makassar -243- Bau-Bau-330- Banggai-231- Bitung -146- Ternate -153-Bacan-263- Sorong -220- Manokwari -140- Biak -310- Jayapura -310- Biak -140- Manokwari -220- Sorong -263- Bacan -153- Ternate -146 - Bitung - 231- Banggai - 330 - Bau-Bau - 243- Makassar - 458 - Surabaya	14 Hari	4.988 Mil Laut
16	KM. KELUD	Tg. Priok	Tg.Priok -521- Batam -45 - Tg.Balai -344- Belawan -344 - Tg.Balai - 45- Batam -521 - Tg.Priok	7 Hari	1.820 Mil Laut

NO	NAMA KAPAL	PANGKALAN	TRAYEK	1 ROUND VOYAGE	JARAK
17	KM. PANGRANGO	Ambon	Ambon - 132 - Banda - 132 - Ambon - 105 - Namrole - 105 - Ambon - 132 - Banda - 300 - Saumlaki - 300 - Banda - 132 - Ambon - 132 - Banda - 300 - Saumlaki - 300 - Banda - 132 - Ambon	14 Hari	2.202 Mil Laut
18	KM. SANGIANG	Bitung	Bitung -150- Jailolo -20- Ternate - 153 - Bacan - 131 - Sanana - 110 - Namlea - 82 - Ambon - 132 - Banda - 73 - Geser - 105 - Fak-fak - 105 - Geser - 73 - Banda - 132 - Ambon - 82 - Namlea - 110 - Sanana - 131 - Bacan - 153 - Ternate -20- Jailolo -150- Bitung	14 Hari	1.912 Mil Laut
19	KM. WILIS	Makassar	Batulicin - 260 - Makassar - 210 - Labuanbajo - 83 - Bima - 99 - Waikelo - 80 - Waingapu - 98 - Ende - 146 - Kupang -137- Kalabahi -137- Kupang -146- Ende - 98 - Waingapu - 80 - Waikelo - 99- Bima - 83 - Labuanbajo -210- Makassar - 260 - Batulicin	14 Hari	2.226 Mil Laut
20	KM. EGON	Surabaya	Waingapu -320- Lembar - 272 -Surabaya -333- Batulicin -261 - ParePare -300- Bontang -300- Pare-Pare -300- Bontang -300- Pare-Pare -261- Batulicin -333- Surabaya -272- Lembar -320- Waingapu	14 Hari	3.572 Mil Laut
21	KM. DOROLONDA	Surabaya	Trayek A : Surabaya -485 -Balikpapan - 188 - Donggala - 476 - Bitung - 146 - Ternate - 306 -Sorong- 220 - Manokwari - 169 -Nabire- 100 - Serui- 310- Jayapura - 310 -Serui -100- Nabire -169- Manokwari - 220- Sorong -306- Ternate -146-Bitung - 476- Donggala -188- Balikpapan -485- Surabaya	14 Hari	4.800 Mil Laut
			Trayek B : Surabaya -458- Makassar -243- Bau-Bau -393- Namlea -82- Ambon -345- Sorong -220- Manokwari -169- Nabire -86- Waren -306- Jayapura -306- Waren -86- Nabire -169- Manokwari -220- Sorong - 345- Ambon -82- Namlea -393- Bau-Bau -243- Makassar -458- Surabaya	14 Hari	4.604 Mil Laut

NO	NAMA KAPAL	PANGKALAN	TRAYEK	1 ROUND VOYAGE	JARAK
22	KM. NGGAPULU	Tg. Priok	Tg.Priok -396- Surabaya -458- Makassar -243- Bau-Bau -393- Namlea -82- Ambon -323- Ternate -146- Bitung -146- Ternate -323- Ambon -82- Namlea -393- Bau-Bau -243- Makassar -458- Surabaya -396- Tg.Priok	14 Hari	4.082 Mil Laut
23	KM. LABOBAR	Tg. Priok	Tg. Priok -396- Surabaya - 458- Makassar -243- Bau-Bau -407- Ambon -132- Banda -197- Tual -109-Dobo -145- Kaimana - 182- Fak-Fak - 182- Kaimana -145- Dobo -109- Tual -197-Banda -132- Ambon -407- Bau-Bau -243- Makassar -458- Surabaya -396- Tg. Priok	14 Hari	4.538 Mil Laut
24	KM. GUNUNG DEMPO	Tg. Priok	Tg.Priok - 396- Surabaya -458- Makassar-868- Sorong -220- Manokwari -120- Wasior - 110- Nabire -395- Jayapura -395- Nabire - 110- Wasior -120- Manokwari -220- Sorong -868- Makassar -458- Surabaya -396- Tg.Priok	14 Hari	5.134 Mil Laut
25	KFC. JET LINER	Kendari	Kendari - 110 - Wanci - 110 - Kendari- 110 - Wanci -110- Kendari 72 - Raha - 72 - Kendari - 110 - Wanci - 110 -Kendari - 110 - Wanci - 110 - Kendari	7 Hari	1.024 Mil Laut
26	KM. UMSINI	Makassar	Balikpapan -302- Makassar -243- Bau-Bau -393- Namlea -82- Ambon -330- Tual -138- Kaimana -182- Fak-Fak -182- Kaimana - 138- Tual -330- Ambon -82- Namlea -393- Bau-Bau -243- Makassar -302- Balikpapan	14 Hari	3.340 Mil Laut



DIREKTOR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

MUHAMMAD MASYHUD

NPWP 00622 199803 1 001